BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan membuat masyarakat menuntut terbentuknya pemerintahan yang besih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, dimana masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia sudah menjangkau pemerintahan secara interaktif. Maka, pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian, perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang komplek dengan negara lain, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat internasional.

Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi, serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat yang disebut dengan *e-government* yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat supaya menjadi pemerintahan yang baik (*good government*).

Akan tetapi, di setiap instansi pemerintah sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap instansi. Hal ini akan membuat struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi akan berbeda-beda di setiap instansi. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan untuk acuan bagi setiap instansi pemerintah yang ingin menuju pemerintahan yang baik yaitu harus mengacu

kepada INPRES No.3 Tahun 2003 yang merupakan dasar bagi seluruh kebijakan detail teknis dalam mengembangkan *e-government*.

Di dalam INPRES No.3 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa untuk mengembangkan *e-government* harus disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap instansi pemerintahan yang mencakup :

a. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
b. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
c. kondisi kegiatan layanan saat ini;
d. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki;

Jangka waktu penerapan *e-government* di setiap instansi pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan *e-government* secara nasional. Pemda Kab. Garut berusaha untuk menerapkan *e-government* ini, tetapi masih mendapatkan kendala jika mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional terutama pada anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kab. Garut dan kondisi infrastruktur yang masih menjadi kendala, seperti belum adanya *Data Center*, jaringan internet yang terpusat dll.

Untuk mengatasi bagaimana *e-government* ini bisa diterapkan dengan kendala-kendala yang dimiliki oleh Pemda Kab. Garut. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah membuat suatu rencana strategi yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada dan menyusunnya sedemikian pula, sehingga mendapatkan suatu rencana strategi yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Tetapi dalam mengelola strategi pemerintahan daerah, harus sesuai dengan pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan beberapa hal diantaranya adalah :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJP nasional.
c. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Dan mengacu kepada pasal 151 yang menjelaskan bahwa untuk membuat suatu rencana strategi yaitu harus :

a. Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategi (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif,
b. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan aturan dalam undang-undang di atas, RPJP, RPJM dan RKPD menjadi acuan satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana strategi SKPD yang optimal. Rencana strategi ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka suatu metoda analisis yang diharapkan dapat menghasilkan suatu

rencana strategi yang optimal adalah menggunakan *IT Balanced Scorecard* dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) yang nantinya diharapkan dapat memperoleh suatu usulan strategi untuk masa depan Pemda Kab. Garut serta dapat menyusun usulan strategi berdasarkan prioritas sehingga cocok, tepat, pas dan sesuai dengan visi misi organisasi dalam menerapkan *e-government* dan tugas pokok Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut antara lain adalah mengembangkan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, pengembangan sistem keamanan informasi, infrastuktur jaringan dll.

Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Fred R. David bahwa cara menentukan strategi yang benar harus melakukan tiga tahapan kerangka kerja yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih strategi yang paling tepat, dengan matrik sebagai model analisisnya. Matrik yang dimaksud adalah *External Factor Evaluation Matrix* (EFE), *Internal Factor Evaluation Matrix* (IFE), Matrik SWOT, *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Dan pada penelitian ini mencoba menggunakan teknik yang diterapkan oleh Fred R. David tetapi dengan memodifikasinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana menyusun dan mengusulkan tahapan prioritas strategi yang optimal untuk menerapkan *e-government* dengan kendala yang ada berupa anggaran dan infrastruktur, menggunakan *IT Balanced Scorecard* dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) supaya efektif (*time*), efisien (*budget*) dan transparan (*policy*), dengan cara menganalisis disain strategi yang prioritas terlebih dahulu, disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis disain strategi yang prioritas disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian dipetakan kedalam *IT Balanced Scorecard.*
2. Menyusun dan mengusulkan tahapan prioritas strategi yang optimal untuk merealisasikan *e-government* menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan hasil dari pemetaan *IT Balanced Scorecard*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa, instansi yang dijadikan penelitian, univeristas maupun peneliti lain dapat mendapatkan manfaat yang terdapat dari hasil penelitian ini, adapun secara rinci manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Memberikan usulan prioritas strategi yang optimal kepada Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
2. Memberikan suatu gambaran strategi mana yang harus dilakukan pertama kali dan selanjutnya atau disebut dengan tahapan prioritas strategi oleh Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dengan kendala-kendala yang ada sampai tercapai tujuan yang diinginkan yaitu dapat menerapkan *e-government* untuk menuju *good government* dan terealisasinya tugas pokok Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
3. Bagi universitas dapat menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa lembaga yang dapat menunjang kemajuan pendidikan dan untuk memenuhi kurikulum yang telah ditentukan.
4. Bagi mahasiswa dapat memahami dan menambah pengetahuan serta wawasan bagaimana menyusun suatu rencana strategi bagi Pemerintah Daerah.

5. Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman/ pemikiran kepada peneliti lain yang akan mengambil tesis dalam kajian yang sama, sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan.

1.5. Pembatasan Masalah dan Asumsi

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah agar dalam penjelasannya tidak keluar dan menyimpang, lebih terarah dan dapat dipahami sesuai dengan yang diharapkan serta terorganisasi dengan baik. Adapun batasan masalahnya adalah :

1. Ruang lingkup penelitian dalam merancang tahapan prioritas rencana strategi yang bertujuan untuk menerapkan *e-government* ini dilakukan di Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
2. Metode yang digunakan untuk menganalisis disain strategi menggunakan analisis SWOT dan matrik SWOT karena sangat mudah dan sangat efisien untuk digunakan dalam melihat kondisi berbagai faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan, serta menemukan strategi yang tepat untuk pengembangan suatu organisasi.
3. *IT Balanced Scorecard* hanya digunakan untuk memetakan analisis disain strategi generik yang dihasilkan oleh matrik antara Strategi SO dengan hasil Gap Analisis terhadap RPJMD ke masing-masing perspektif, tanpa menghitung skor yang ada pada *IT Balanced Scorecard*, dan membuat disain hubungan sebab akibat dari setiap strategi yang telah dipetakan kedalam masing-masing perspektif, yang diharapkan dapat menghasilkan rancangan strategi dimasa datang dengan hubungan sebab akibat tersebut.
4. Metode AHP digunakan untuk mencari usulan tahapan prioritas strategi yang optimal, berdasarkan hasil dari pemetaan dan hubungan sebab akibat *IT Balanced Scorecard*, dengan membuat bobot perbandingan dan tingkat kepentingan dari setiap strategi, tanpa dibuat dekomposisi masalah terlebih dahulu atau membuat struktur hirarki dari kriteria-kriteria yang mendukung.

5. Hasil dari penelitian ini hanya berupa usulan tahapan prioritas strategi yang optimal untuk merancang RPJMD lima tahun kedepan, tidak sampai usulan waktu implementasi rencana strateginya. Adapun RPJMD yang sedang dipakai hanya sebagai salah satu acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terstruktur. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

   Bab ini membahas hasil dari penelitian yang telah dikaji sebelumnya yang nantinya mendasari penyusunan laporan dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari bab ini adalah memberikan dasar acuan secara ilmiah yang berguna dalam membentuk kerangka berpikir yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

   Bab ini merupakan jembatan yang menghubungkan kajian pustaka yang terdapat pada bab II dengan pelaksanaan penelitian atau analisis dan pembahasan yang terdapat pada bab IV. Diawali dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian dan membuat langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir dan disusun berdasarkan kondisi yang ada pada tempat penelitian didasari oleh kajian pustaka pada bab II.

d. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

   Pada bab ini akan melakukan analisis dan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan menggunakan langkah-langkah penelitian yang telah dibuat pada bab III untuk menjawab tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan dan saran.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dilakukan dua hal yaitu hasil analisis dan pembahasan akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian untuk menjawab tuntutan dari tujuan penelitian. Dan memberikan saran bagi tempat penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya.